KR-Antara/Alyosius Jarot Nugroho

***PENURUNAN JUMLAH PENUMPANG:** Calon penumpang berada di area pintu keberangkatan Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (1/10). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penumpang penerbangan domestik selama Januari-Agustus 2020 sebanyak 21,6 juta orang atau turun 56,99 persen dan jumlah penumpang internasional 3,5 juta orang atau turun 71,51 persen dibandingkan periode yang sama 2019.*

AKHIR TAHUN 2020

Program PEN Terealisasi 100 Persen

JAKARTA (KR) - Pemerintah optimistis realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tercapai 100 persen pada akhir tahun ini.

"Sejak Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dibentuk 20 Juli 2020, secara kumulatif sudah direalisasikan Rp 255,22 triliun untuk empat sektor. Secara mingguan, bisa kita lihat realisasinya makin lama makin cepat," kata Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Kamis (1/10).

Dijelaskan, sampai akhir September 2020 ini atau akhir Kuartal III-2020, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (Satgas PEN) telah merealisasikan penyerapan anggaran PEN melebihi target Rp 100 triliun, serta terus mendorong akselerasi penyerapan mencapai 100 persen pada Desember 2020, untuk menjaga pergerakan dan ketahanan ekonomi di masyarakat dan mendukung pergerakan angka pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik.

Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, akhir Kuartal III realisasi Program PEN secara kumulatif mencakup pemulihan ekonomi dan kesehatan sudah berhasil terealisasi Rp 304,6 triliun atau 43,8 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun.

Empat sektor yang dimaksud adalah sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi. Dalam empat sektor itu Satgas PEN sudah menyalurkan pertambahan mingguan perklaster PEN sebesar Rp 137,89 triliun. Sedangkan sektor pembiayaan korporasi akan mulai direalisasikan pada awal Oktober 2020 atau Kuartal IV, sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal tersebut. "Sampai akhir tahun kami optimis seluruh anggaran bisa terserap, sehingga bisa memberikan daya ungkit yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III dan IV," jelas Budi Gunadi Sadikin.

Ia menjelaskan, pada kelompok pertama atau sektor perlindungan sosial ada Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terealisasikan Rp 36,3 triliun atau 97,1 persen dari pagu Rp 37,4 triliun dengan 10 juta keluarga penerima manfaat atau 40 juta rakyat kategori miskin. **(Sim)-d**

DEFLASI 3 BULAN BERTURUT-TURUT

Tanda Daya Beli Masyarakat Turun

JAKARTA (KR) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi untuk pertama kalinya terjadi selama tiga bulan berturut-turut sejak periode Maret-September 1999.

"Sebelumnya deflasi berturut-turut terjadi pada 1999, mulai Maret hingga September," kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Kamis (1/10). Deflasi pada periode tersebut berlangsung selama tujuh bulan seiring adanya pemulihan ekonomi setelah Indonesia dihantam krisis finansial 1998.

BPS menyatakan terjadinya deflasi 0,05 persen pada September 2020 atau sama dengan periode Agustus-Juli yang juga mengalami deflasi. Dengan demikian, selama tiga bulan berturut-turut telah terjadi deflasi pada perekonomian nasional yaitu Juli sebesar 0,10 persen dan Agustus serta September masing-masing 0,05 persen.

Suhariyanto mengatakan, deflasi yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut harus menjadi perhatian khusus karena merupakan tanda-tanda dari perlemahan daya beli masyarakat.

Kondisi itu juga terlihat dari inflasi inti yang tercatat 1,86 persen atau menurun sejak April 2020. Padahal dalam periode tersebut ada momen perayaan Hari Raya Idul Fitri yang biasanya menyumbang inflasi tinggi. "Yang perlu diwaspadai adalah inflasi inti yang turun sejak Maret. Inflasi inti rendah itu telah menunjukkan daya beli masih sangat-sangat lemah. Deflasi juga perlu diwaspadai karena sudah tiga bulan berturut-turut, artinya Triwulan III ini daya beli rendah," katanya.

Meski demikian ia mengakui lesunya permintaan dari masyarakat tersebut terjadi karena Pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah membatasi kegiatan maupun aktivitas ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, deflasi yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut merupakan sinyal bahwa ekonomi Indonesia belum pulih karena permintaan masih rendah. "Inflasi akan rendah dan dalam konteks ini tiga bulan berturut-turut deflasi kecil. Ini jadi sinyal bagi Pemerintah interpretasinya bahwa sisi permintaan belum pulih," katanya dalam diskusi daring di Jakarta.

Febrio menuturkan, belum pulihnya permintaan yang terlihat dari deflasi tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah untuk terus menggenjot berbagai stimulus yang bisa menggerakkan permintaan seperti Bantuan Sosial, Banpres Produktif, dan Bantuan Subsidi Gaji. "Masih harus kita pastikan seperti perlindungan sosial yang masih lanjut terus sampai akhir tahun dan lumayan *on schedule* karena setiap bulan ada *disbursement* sampai Rp 200 triliun lebih," ujarnya. **(Ant/Lmg)-d**

Ajukan PK, Hukuman Anas Jadi 8 Tahun

JAKARTA (KR) - Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan dalam perkara penerimaan hadiah atas sejumlah proyek pemerintah dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Sehubungan hal itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan, biar masyarakat yang menilai atas putusan PK.

Selain itu ia menegaskan, yang pasti KPK telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya. "Biar masyarakat yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan PK tersebut," jelas Nawawi dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Sebelumnya MA mengurangi vonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam perkara penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dengan hukuman menjadi 8 tahun penjara. "Permohonan PK yang diajukan pemohon/terpidana Anas Urbaningrum pada Rabu, 30 September 2020 telah diputus MA," kata Jubir MA Andi Samsan Nganro.

Alasan permohonan PK pemohon/terpidana yang didasarkan pada adanya 'kekhilafan hakim' dapat dibenarkan. Dalam putusan PK, jelas Andi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah denda Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan. **(Ful)-d**

Negara Harus Hadir Selesaikan Intoleransi

YOGYA (KR) - Persoalan intoleransi yang sering terjadi di masyarakat sebenarnya bisa diatasi dengan baik, asalkan negara turut hadir menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenyataan di lapangan selama ini saat muncul kasus intoleransi tak ada ketegasan aparatur pemerintah. Bahkan, cenderung mendiamkan.

Pada sisi lain, keberadaan media sosial (medsos) yang terlalu bebas' mengangkat isu intoleransi terkadang membuat masalah tersebut menjadi heboh, sehingga memancing kontroversi di masyarakat.

Hal itu mencuat dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang digagas Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Kamis (1/10) di Yogya. Peserta kegiatan ini dari unsur forum umat beragana, wakil dari Kemenag DIY, Kesbangpol dan wartawan. Acara ini dipandu Prof Dr H Koeswinarno MHum, peneliti utama Puslitbang Badan Litbang dan Diklat Kemenag.

Menurut KH Abdul Muhaimin, peristiwa intoleransi yang sering terjadi di DIY sebenarnya bisa secepatnya diatasi. Namun, ia melihat saat suatu kasus intoleransi mencuat cenderung dibesar-besarkan, lebih-lebih ketika kemudian beredar di medsos. "Saya melihat seperti ada motif-motif untuk kepentingan tertentu," ujarnya.

Wakil dari Kemenag DIY, Drs H Solikhan Amin MHI menilai, dari pengamatan di lapangan munculnya beberapa kasus intoleransi, karena desakan faktor ekonomi. Masalah ini menjadi pemicu ditambah lagi kemudian mencuat di medsos, sehingga menjadi 'gaduh'.

Dua peserta lainnya, Dr Gregorius Nur Haryanto SH dari UAJY dan Joko Suryanto MHum dari Kesbangpol sependapat, perlu ada ketegasan aparatur negara/pemerintah untuk tidak ragu-ragu menyelesaikan ketika terjadi konflik atau masalah yang berkaitan dengan agama maupun intoleransi lainnya. Dengan kata lain, jangan mendiamkan persoalan tersebut tanpa ada penyelesaian. "Aparatur harus di garis depan," kata Nur Haryanto.

Sementara itu, data survei kerukunan umat beragama dari 2017-2019 di DIY yang dikeluarkan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag menyebutkan, sikap toleransi, kesetaraan, kerjasama dan kerukunan di DIY secara umum di atas rata-rata nasional. **(Obi)-f**

DIBUKANYA PENERBANGAN INTERNASIONAL DI BIY

Ekonomi Optimis Naik dengan Pariwisata

YOGYA (KR) - Telah dibukanya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) untuk operasional maskapai Scoot rute Singapura (SIN) - Yogyakarta (YIA) - Singapura (SIN) menjadi pertanda baik untuk pergerakan perekonomian dan perlu disambut optimis industri pariwisata dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

"Pembukaan penerbangan internasional ini bisa menjadi peluang. Sesuai dengan kebijakan pemda untuk pariwisata dibuka pelan-pelan. Kedatangan tamu/wisatawan juga wajib disiplin dalan SOP Covid-19," ucap Ekonom, Dosen FBE UAJY, Sekretaris ISEI Yogya, Dr Y Sri Susilo dalam bincang-bincang editorial dengan Redaktur Pelaksana Kedaulatan Rakyat, Primaswolo Sujono, Kamis (1/10) yang disiarkan di YouTube Kedaulatan Rakyat TV.

KR-Istimewa

Y Sri Susilo

Sri Susilo menyebutkan pembukaan ini merupakan perkembangan luar biasa mengingat sebelumnya Pemerintah menyatakan Penerbangan Internasional ditutup sampai dengan Desember 2020 tetapi kini bulan Oktober 2020 sudah buka. "Langkah-langkah pemulihan ekonomi dan menjaga kesehatan harus seimbang dan sejalan dalam penanganan Covid-19 ini, juga protokol kesehatan 3M (masker, menjaga jarak, mencuci tangan)," tegasnya.

Menurut Sri Susilo, peluang ini harus ditangkap industri pariwisata dan masyarakat Yogya. "Pintu wisata sudah dibuka kembali kita bisa belajar dari Bali yang kesadaran masyarakatnya tinggi dengan pengembangan pariwisata terbukti saya pernah jalan-jalan di Bali sepanjang jalan bersih, karena masyarakat Bali sadar pentingnya pariwisata," ungkapnya.

Demikian pula marketing Pariwisata Malaysia yang sebelum Covid-19 mampu mendatangkan 25 juta wisatawan internasional di atas Indonesia karena mampu menjual dengan paket wisata menarik. "Mereka tidak punya Borobudur, Prambanan tetapi bisa ikut menjual," ujarnya

Maka Yogyakarta yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pariwisata harus bisa mengemas pariwisata yang aman dari Covid-19. "Hal ini sudah dilakukan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY yang sudah melakukan sertifikasi SOP Covid-19 pada hotel anggotanya, demikian juga hindari pemberitaan viral yang merugikan pariwisata Yogya seperti kerumunan di Malioboro, tanpa masker di objek pariwisata dan lainnya," ucap Sri Susilo. **(R-4)-f**

POLRI CERMATI PELAKSANAAN PILKADA

Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

JAKARTA (KR) - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan akan menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, guna mencegah timbulnya klaster baru penyebaran Covid-19.

"Polri akan melaksanakan sanksi hukum tegas bagi setiap pelanggaran protokol kesehatan, agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam webinar 'Menyongsong Pilkada Serentak 2020, Tertib Protokol Kesehatan atau Kami Tindak', di Jakarta, Kamis (1/10).

Argo mengingatkan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah menerbitkan Maklumat Nomor: MAK/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sebagai bentuk pengaturan mencegah timbulnya klaster baru penyebaran Covid-19.

Dengan adanya aturan tersebut, apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan isi maklumat dalam konteks tertib protokol kesehatan, maka setiap anggota Polri akan melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, Argo mengimbau kepada semua pihak agar tertib menerapkan protokol kesehatan selama gelaran Pilkada Serentak 2020. "Jika tidak, kami akan melakukan tindakan hukum," kata dia.

Ditambahkan, Kapolri telah meminta jajarannya untuk tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar protokol kesehatan.

Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto menambahkan, sampai hari kelima kampanye Pilkada Serentak 2020 masih berlangsung aman. Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang mendorong agar calon kepala daerah menggunakan metode kampanye melalui media sosial atau media daring.

"Ada sanksi tegas dalam Pasal 88A sampai 88E PKPU itu, mulai dari peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kampanye, sampai penyampaian kepada Polri untuk dilakukan penindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan apabila terjadi pelanggaran," ujar Ilham. **(Ant)-d**

Lagi, Densus 88 Geledah Rumah di Berbah

SLEMAN (KR) - Densus 88 Antiteror kembali melakukan penggeledahan sebuah rumah di kompleks perumahan Dusun Cepor Sendangtirto Berbah Sleman, Kamis (1/10). Tiga jam lamanya, petugas menggeledah rumah yang dikontrak BY (32), yang tercatat sebagai warga Sumberlawang Sragen Jawa Tengah.

Dukuh Cepor, Daroji menjelaskan, penggeledahan dimulai sekitar pukul 09.30 dan disaksikan istri BY.

"Penggeledahan berlangsung sekitar tiga jam. Sebelumnya, saya terlebih dulu dihubungi petugas untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Saat penggeledahan juga disaksikan istri dari yang mengontrak rumah tersebut. Istrinya seorang dosen," ungkap Daroji kepada wartawan.

Daroji, membenarkan, penggeledahan dilakukan Densus 88 Antiteror. Sehari sebelum penggeledahan tepatnya, Rabu (30/9) sore, BY terlebih dahulu ditangkap Densus di depan sebuah rumah sakit daerah Berbah Sleman. Hasil penggeledahan, Densus mengamankan flash disk, harddisk dan beberapa buku bacaan keagamaan.

BY mengontrak di rumah itu sudah sekitar satu tahun. Di rumah bercat warna hijau itu, BY tinggal bersama istri dan seorang anaknya yang berusia tiga tahun. Dalam kesehariannya, BY bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan istrinya, salah satu dosen.

Selama penggeledahan, pengamanan di sekitar lokasi dilakukan sangat ketat. Dikonfirmasi terkait penggeledahan itu, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK enggan berkomentar banyak. "Di lokasi kami hanya melakukan pengamanan," ucapnya. **(Ayu)-d**

KR-Wahyu Priyanti

Polisi melakukan penjagaan di jalan arah masuk rumah yang digeledah Densus 88 Antiteror.